



CONTINUOUS IMPROVMENT REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN



SISTEMATIKA

- 01** **FRAMEWORK RENCANA AKSI IMPLEMENTASI
REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT**
- 02** **CONTINUOUS IMPROVEMENT IMPLEMENTASI
REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN**



01

FRAMEWORK RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT



Perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) yang di tunjukan dengan **berintegritas, berkinerja tinggi, dan melayani secara prima.**

2020

INDEX RB DINKES
TAHUN 2020 :
21,85

2021

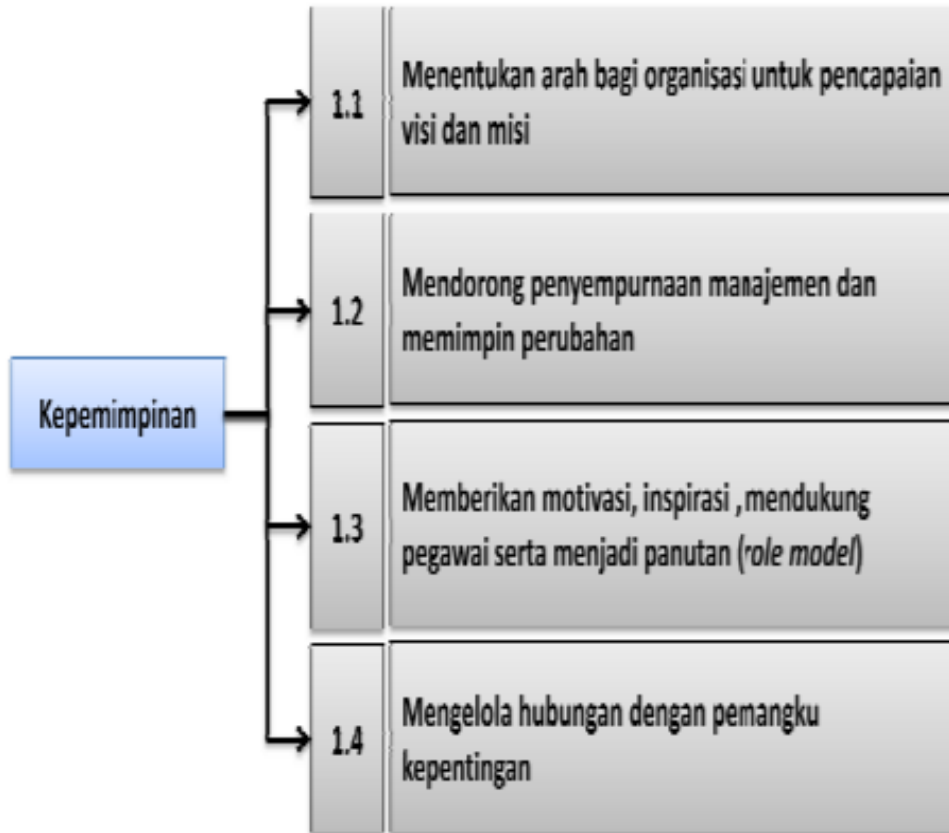
INDEX RB DINKES
PERINGKAT 29
43,25 (C) dan Nilai
BUDAYA KERJA 68,46

P
R
O
B
L
E
M

- Masih rendahnya komitmen dalam implementasi reformasi Birokrasi;
- Perapan tata kelola yang belum sepenuhnya diterapkan, masih terkotak-kotak antar bidang/ bagian.
- Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal
- Kurangnya Inovasi dalam menjalankan pekerjaan
- Manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik;
- Lemahnya Sistem Manajemen Pengawasan
- Pekerjaan masih banyak yang dilakukan secara manual.
- Penataan kelembagaan yang masih belum efektif;
- Menerapkan budaya kerja "Komitmen" belum menjadi kebiasaan dalam bekerja;
- Pekerjaan Rutinitas, kurang koordinasi
- Pelaksanaan SOP dan alur belum sepenuhnya di jalankan



KOMITMEN PARA PIMPINAN



TOTAL TRANSFORMATION MODEL





01

MANAJEMEN PERUBAHAN

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → MANAJEMEN PERUBAHAN

TARGET	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melakukan RB; b) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Internal Perangkat Daerah; c) Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi thd perubahan.
RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 2. Membentuk Tim Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 3. Membentuk Agen Perubahan (<i>Agent of Change</i>) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 4. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 5. Menyusun Dokumen Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 6. Menetapkan mekanisme dan menyiapkan media untuk mensosialisasikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala; 8. Menjadikan Pimpinan menjadi role model dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 9. Menciptakan perubahan budaya kerja dan pola pikir dalam organisasi. → Sosialisasi RB Setiap Apel
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022



02

PENATAAN PERUNDANG - UNDANGAN

**PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES →
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TARGET	a) Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perUU yang dikeluarkan oleh Pemerintah; b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perUU
RENCANA AKSI	1. Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait Penyelenggaraan Kesehatan, terkait BLUD dan standar pelayanan lainnya 2. Pengkajian prosedur pembentukan Perda dan Pergub
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022

03

PENATAAN DAN PENGUATAN
ORGANISASI**PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI**

TARGET	a) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan; b) Meningkatnya kinerja dalam pencapaian target
RENCANA AKSI	1. Penataan Kelembagaan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat 2. Penyusunan SOTK yang sesuai dengan kewenangan 3. Evaluasi ABK, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan 4. Penataan kelembagaan UPT
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022



04

PENATAAN PERUNDANG - UNDANGAN

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN	
TARGET	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan SDM b) Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan SDM c) Meningkatnya Disiplin SDM d) Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur Pada Masing2 PD
RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan perencanaan kebutuhan Pegawai 2. Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai 3. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi 4. Pelaksanaan sistem promosi dan mutasi pegawai secara terbuka (<i>open bidding</i>) 5. Penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi 6. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme jabatan fungsional 7. Penerapan kebijakan sanksi, reward dan punishment berbasis kinerja 8. Evaluasi kebijakan sanksi, reward dan punishment berbasis kinerja
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022

05

PENATAAN PERUNDANG - UNDANGAN

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → PENATAAN KETATALAKSANAAN	
TARGET	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Perangkat Daerah; 2. meningkatnya kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan peta proses bisnis seluruh PD 2. Penerapan e-government yang terintegrasi 3. Penerapan e planning dan e-budgeting dalam perencanaan dan penganggaran
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022

06

PENATAAN PENGAWASAN

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → Penguatan Pengawasan		
TARGET	a) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan ; b) Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Keuangan ; c) Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan Wewenang Pada Masing2 Perangkat Daerah	
RENCANA AKSI	1. Penguatan peran APIP di lingkungan Pemda Jawa Barat 2. Pembekalan APIP di Pemda Prov. Jawa Barat 3. Pelaksanaan audit berbasis resiko 4. Penyelesaian TLHP Eksternal dan Internal 5. Peningkatan penerapan SPIP 6. Monitoring dan evaluasi penerapan SPIP	7. Pembangunan ZI (WBK/WBBM) di RSUD milik Provinsi Jabar 8. Launcing WBS dan Pelaksanaan WBS 9. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi 10. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan 11. Tindak lanjut evaluasi BPK RI
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022	
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022	

07

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
TARGET	meningkatnya AKIP.
RENCANA AKSI	1. Penyempurnaan SAKIP Dinkes 2. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala (Bulanan) 3. Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja 4. Pembangunan sistem perencanaan untuk kesesuaian IKU dengan Program/kegiatan 5. Pelaksanaan sistem perencanaan untuk kesesuaian IKU dengan Program/kegiatan 6. SKP Pegawai sebagai penilaian kinerja individu
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022



08

PENATAAN PERUNDANG - UNDANGAN

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DINKES → PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

TARGET	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Lebih Cepat, Lebih Murah, Lebih Aman, Dan Lebih Mudah Dijangkau) Pada Instansi Pemerintah; 2. Meningkatnya Jumlah Jenis Pelayanan Di Fasyankes (UPTD) 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinkes Dan UPTD.
RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan unit-unit pelayanan publik (RSUD dan Balai) 2. Penerapan dan pengembangan pelayanan publik berbasis IT 3. Reviu pelaksanaan SOP 4. Pembinaan pola pikir petugas yanlik 5. pengaduan masyarakat berbasis sistem informasi yang <i>real-time</i> 6. Publikasi Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui website dan media sosial
WAKTU PENYELESAIAN	21- 28 FEBRUARI 2022
PENILAIAN DOKUMEN OLEH ASESOR INTERNAL	1-4 MARET 2022

QUICK WINS

Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan **Program percepatan** dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh Dinkes Jabar dan UPTD

FOKUS PADA HASIL REFORM

Quick Win Mandatory

- Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi *Quick Win* Instansi pemerintah;
- *Quick Win* lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN

Quick Win Mandiri

- Dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi pemerintah

MONITORING



1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Reformasi Birokrasi Dinkes dan UPTD untuk memantau perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam *Rencana Aksi* Reformasi Birokrasi Dinkes Jabar
2. Pertemuan rutin Tim Assesor Internal untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada Dinkes dan UPTD agar konsisten dengan dalam *Rencana Aksi* Reformasi Birokrasi Dinkes Jabar dan memberikan laporan kepada ketua tim RB hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
3. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pokja Pelaksana Reformasi Birokrasi untuk:
 - Membahas Kemajuan, Hambatan Yang Dihadapi, Dan Penyesuaian Yang Perlu Dilakukan Untuk Merespon Permasalahan Atau Perkembangan Lingkungan Strategis;
 - Pengukuran Target-target Kegiatan Reformasi Birokrasi Sebagaimana Diuraikan Dalam *Road Map* Dengan Realisasinya;
 - Survei Terhadap Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Anti Korupsi;
 - Pertemuan Dalam Rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Yang Dikoordinasikan Oleh Biro Organisasi Yang Kemudian Hasilnya Dilaporkan Ke Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

EVALUASI



- Evaluasi triwulan , semesteran atau, tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Ketua Tim RB untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun kedepan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- Evaluasi tahunan di setiap bidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Dinkes Provinsi Jawa Barat;
- Evaluasi tahunan di tingkat Provinsi , yang dipimpin langsung oleh Biro Organisasi

02

CONTINUOUS IMPROVEMENT IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

CAPAIAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI (DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT)

(IMPLEMENTASI RB TIDAK HANYA SEBATAS PEMENUHAN DOKUMEN, TETAPI TELAH BERKONTRIBUSI LANGSUNG TERHADAP CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH)

INDEKS RB
PERANGKAT
DAERAH

A
89,24

HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI RB 2022
(NILAI SELF ASSESSMENT)



DARI 8 UPTD DINKES
2 UPTD MERAH WBK
1 PROSES WBK
1 PROSES WBBM

HASIL EVALUASI
ZONA INTEGRITAS 2021 -
2022 (KEMENPAN RB/TPI)

4 INDIKATOR UTAMA
YANG TERCAPAI
PADA TAHUN 2022
4 INDIKATOR

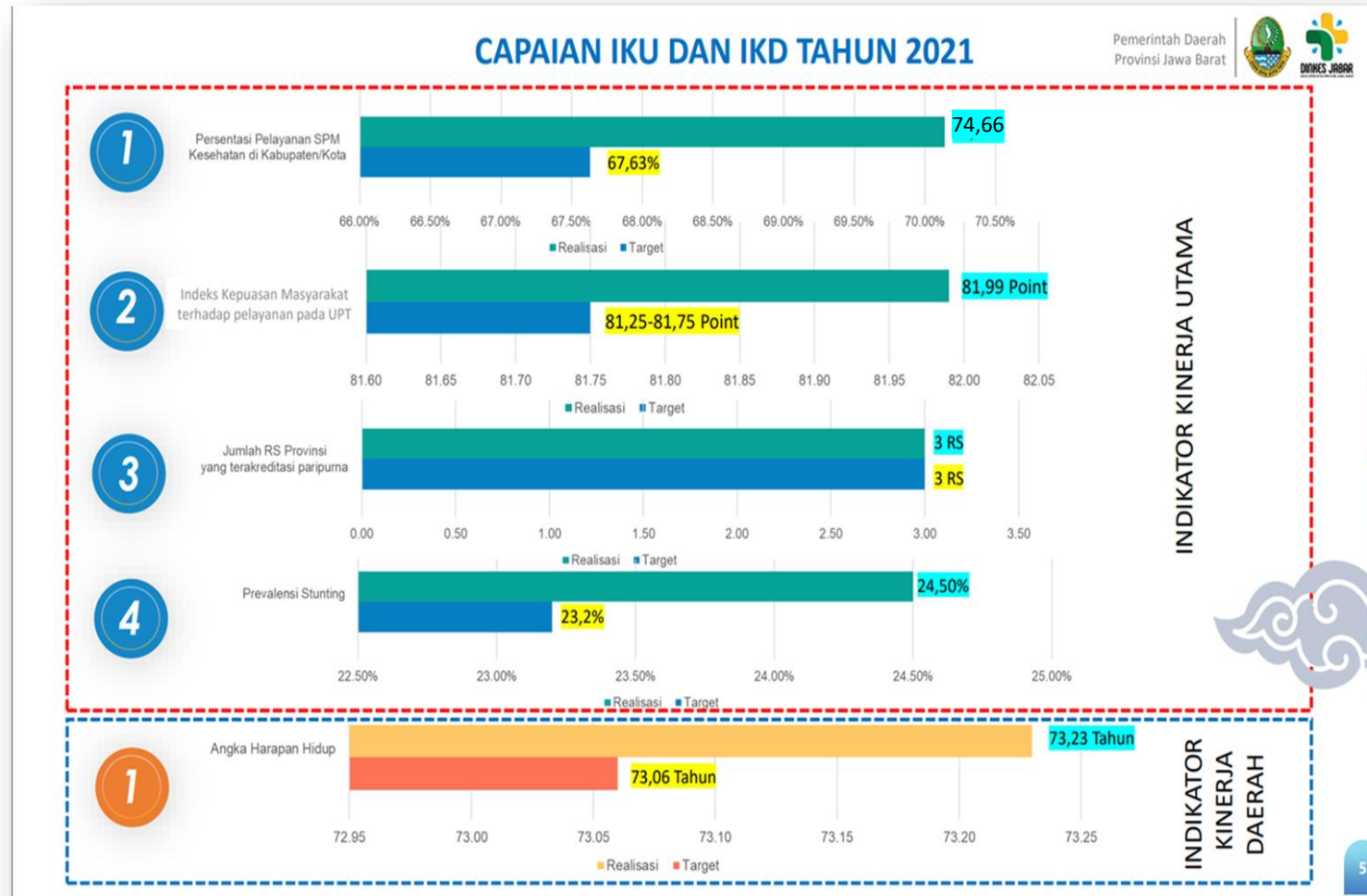
IKU PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

ANGKA HARAPAN
HIDUP MASYARAKAT
JABAR
73,23

IKU GUBERNUR JAWA
BARAT TAHUN 2022



PROGRES CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 2018-2021



**CAPAIAN IKU
PERANGKAT
DAERAH**

KOMITMEN PERUBAHAN

01

KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI ROLE MODEL & AKSELERATOR RB



Ruang Kerja Rb



Role model rb



Apel Pagi



Evaluasi Kinerja



Internalisasi
Berakhlak



Leader Kompetisi



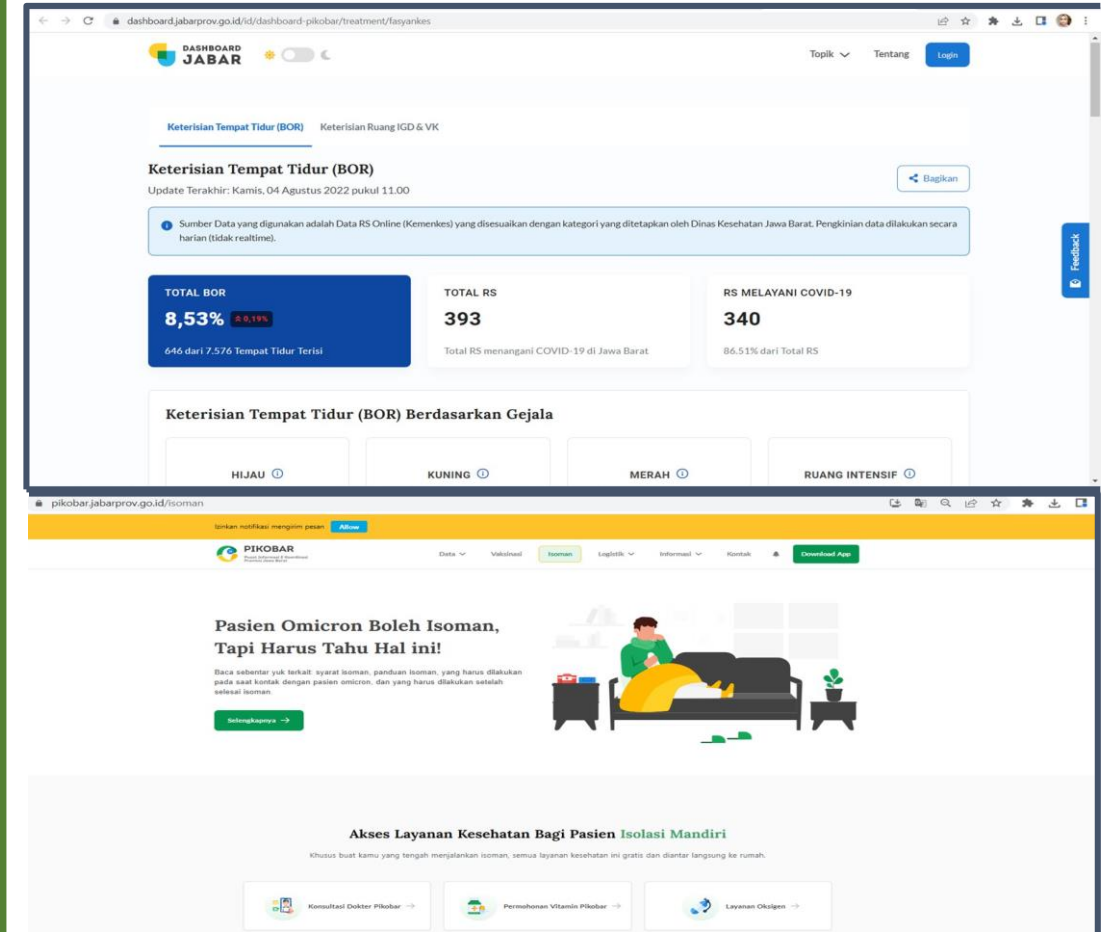
Peningkatan
Inovasi



Pembangunan ZI

02

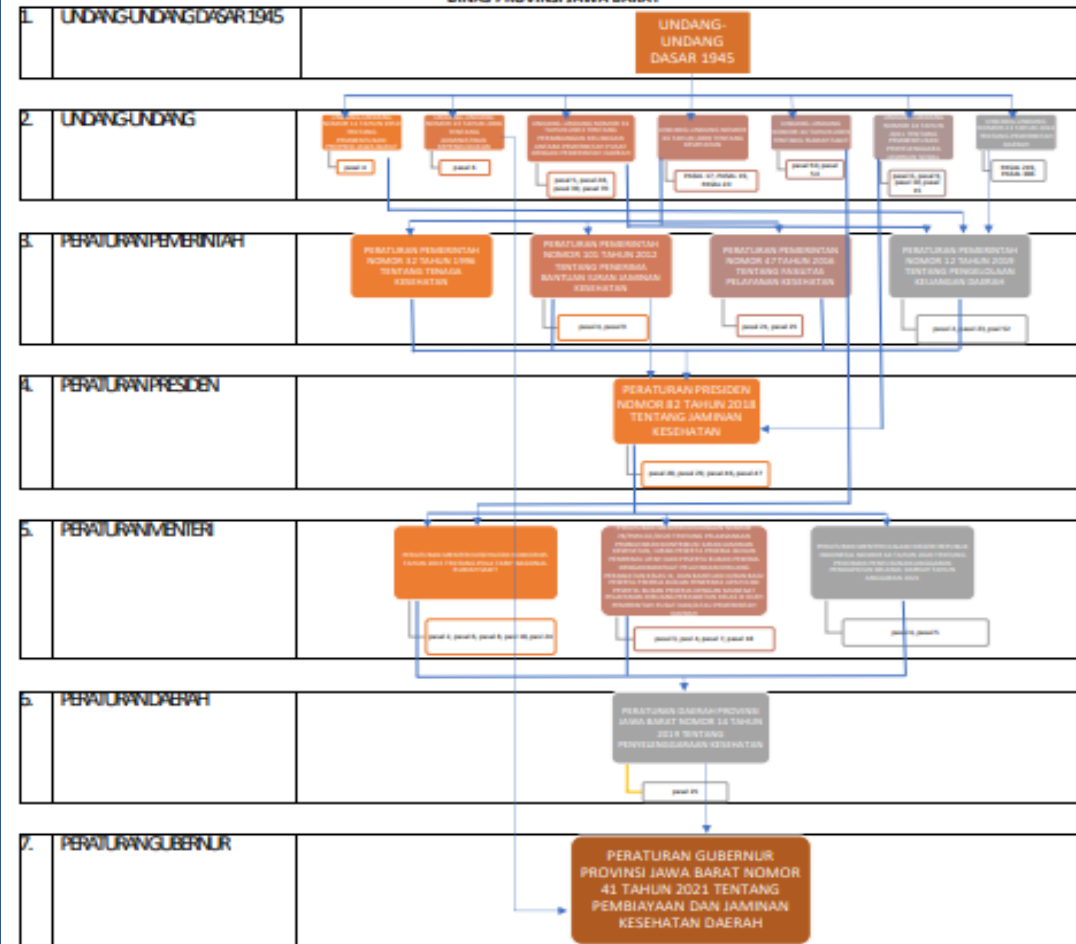
INOVASI AGEN PERUBAHAN



PENYEDERHANAAN REGULASI

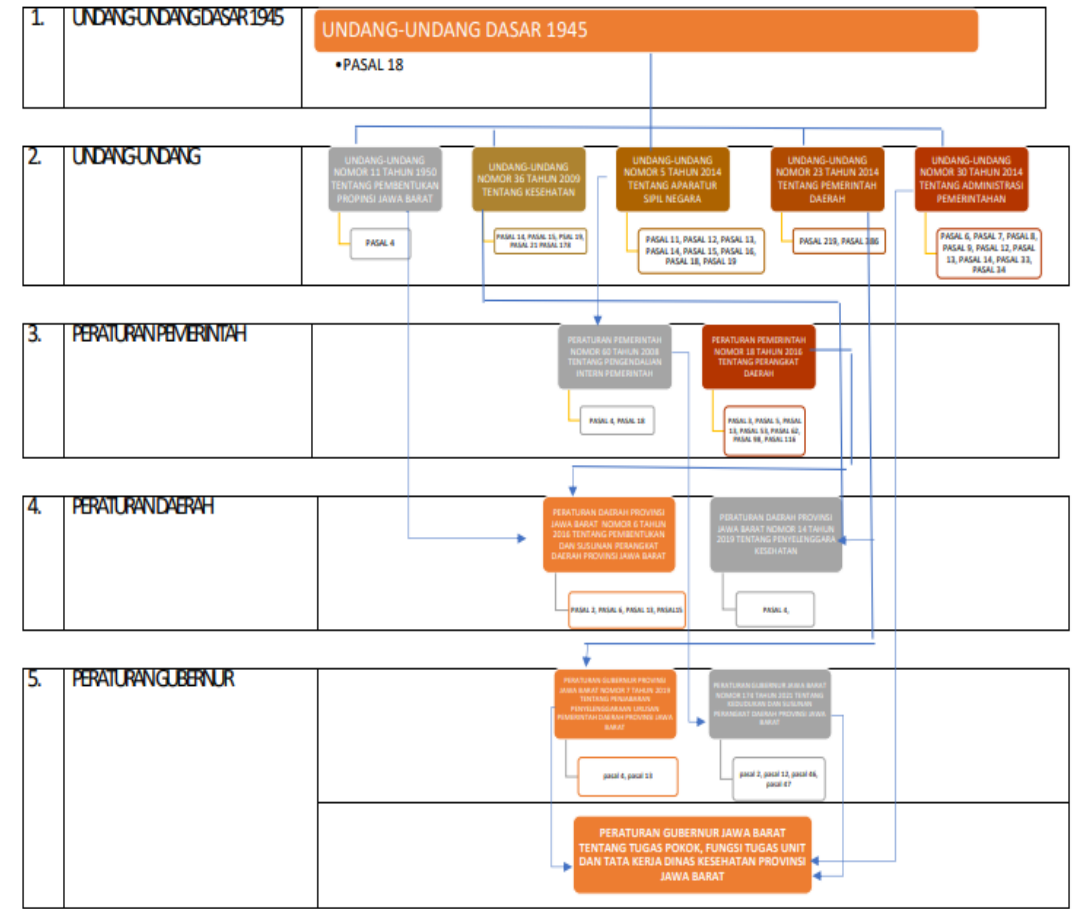
01

PETA KETERKAITAN ANTAR KEBIJAKAN



02

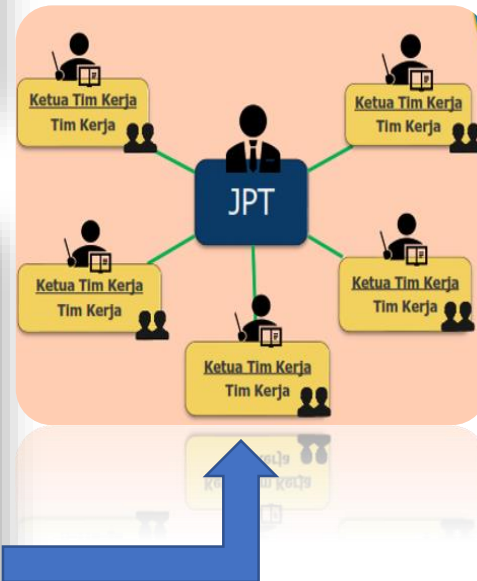
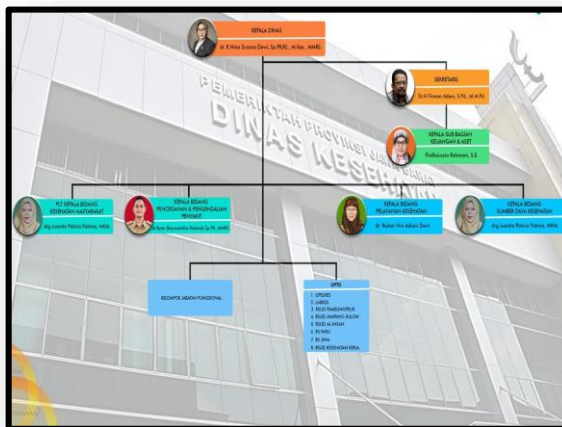
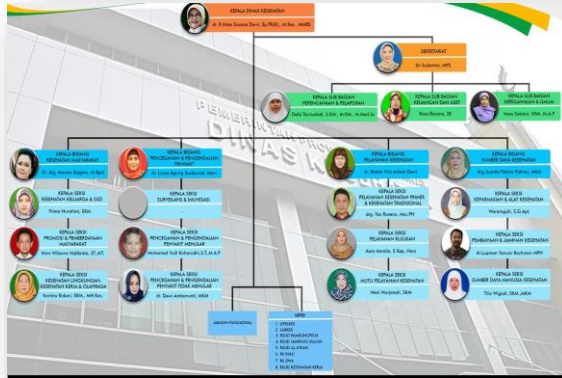
PENYEDERHANAAN REGULASI PELAYANAN



PENATAAN ORGANISASI PASCA PB

01

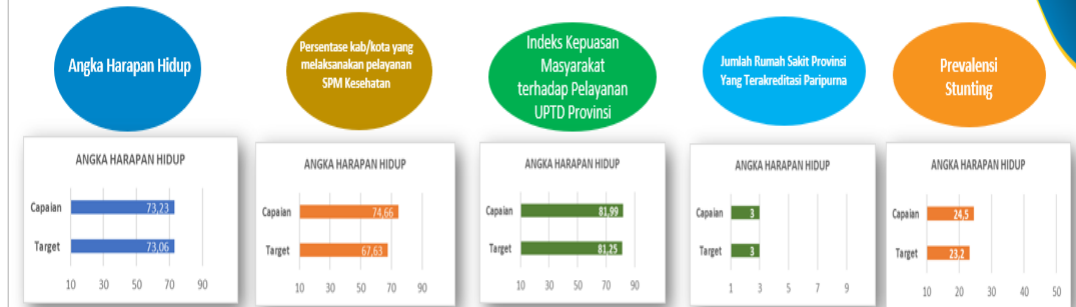
PENETAPAN TIM KERJA



02

CAPAIAN KINERJA TIM

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021



Faktor Pendorong

Banyak faktor yang mempengaruhi AHH ini, termasuk faktor sosial dan ekonomi, untuk Tahun 2021 ekonomi Jawa Barat mengalami pertumbuhan sebesar 3,74 persen. Jumlah Kematian bayi menurun dengan rasio 3,34/1000 KH, jumlah penduduk yang sakit penduduk yang mengalami penurunan dari 47,61 % menjadi 43,41%.

Dipengaruhi oleh pencapaian indikator SPM Kabupaten/Kota dan penguatan pembinaan dan fasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Indeks Kumulatif dari IKM UPTD) Visi dan Misi UPTD untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat melalui perbaikan manajemen Pelayanan Rumah Sakit, Pemenuhan Sarana dan Prasarana, SKTM untuk Masyarakat terutama UPTD RS di Jawa Barat

Target meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RS Provinsi yang berdaya saing 3 RS : RS Paru, RS Al-Ihsan dan RS. Jiwa

Untuk Prevalensi Stunting dipengaruhi oleh Sisi Kesehatan dan Non Kesehatan, 30% intervensi spesifik dan 70% intervensi sensitif. Intervensi Kelahiran Ibu Hamil, Gizi dan menjadi PR Intervensi Sensitif yang harus dikordinasikan dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat Target Amanat RPJMN 14% RPJMD 19,2%

DIGITAL GOVERNMENT

01

PENERAPAN SPBE ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



02

PENERAPAN SPBE LAYANAN PUBLIK



INOVASI IKM



PENINGKATAN PROFESIONALITAS DAN KINERJA ASN

01

PENINGKATAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

IP ASN (NAMA PERANGKAT DAERAH) 2022

81,62

NILAI PADA APLIKASI SIAP JABAR

KUALIFIKASI

13,15

KOMPETENSI

33,63

KINERJA

29,85

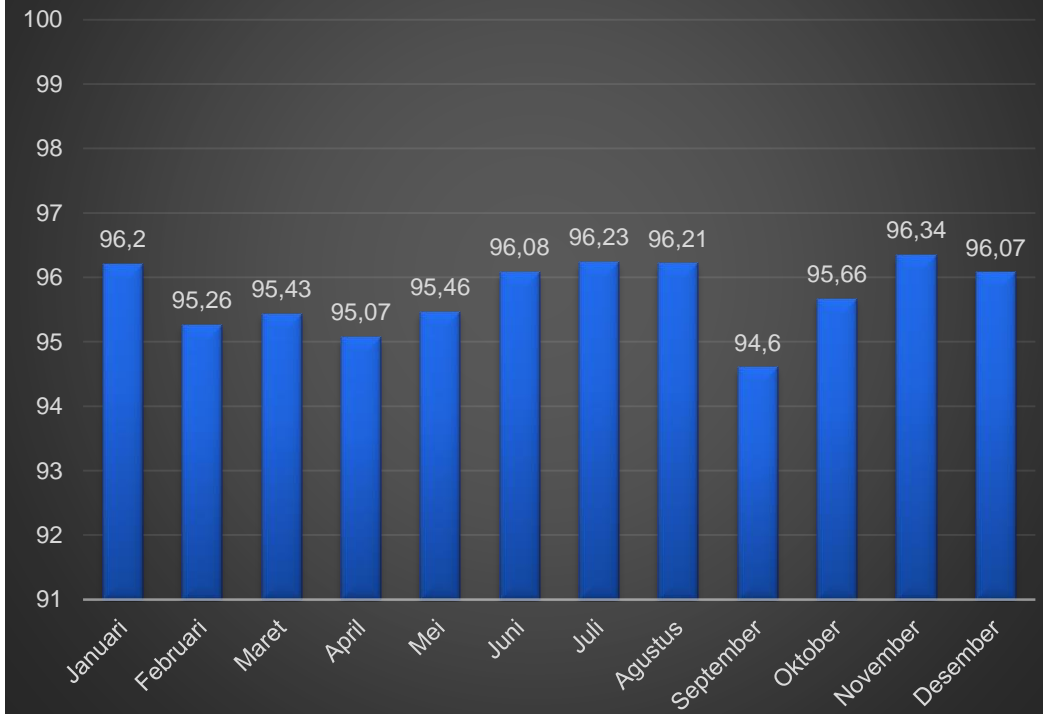
DISIPLIN

4,99

02

PENINGKATAN KINERJA ASN

RATA RATA NILA TRK TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT



RAPORT KINERJA PERANGKAT DAERAH



KOMITMEN INTEGRITAS

01

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



UPTD Labkes Jabar : "Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)" Senin (10/10/2022).



Zona Integritas UPTD RSUD Al Ihsan : dari WBK menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Rabu (12/10/2022).



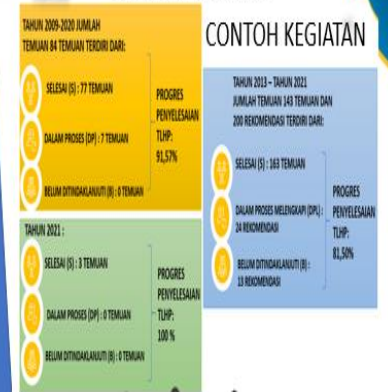
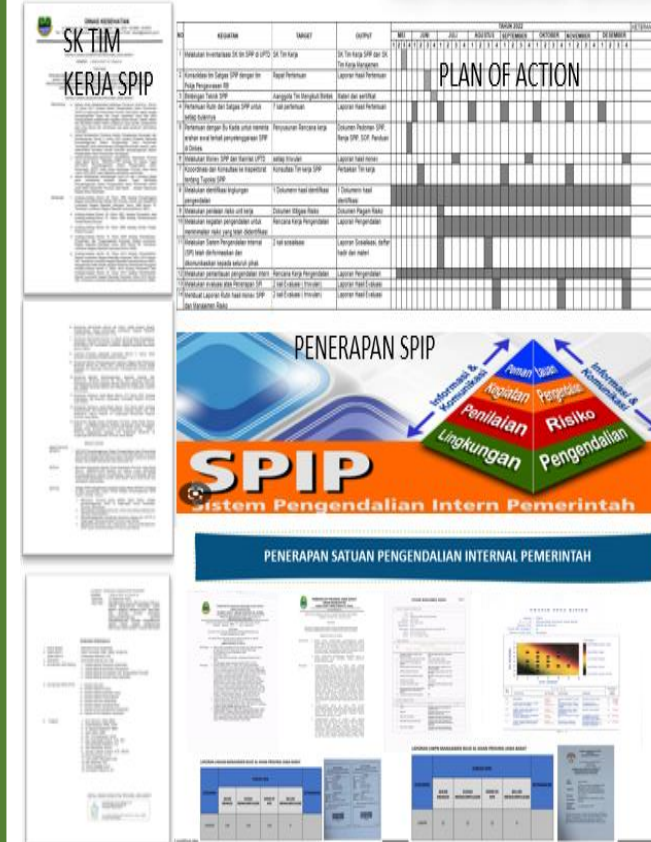
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Tahun 2021

UNIT KERJA YANG DIUSULKAN MERAIH PREDIKAT WBK/WBBM TAHUN 2022

Jenis Layanan	Unit Kerja	Kategori
Layanan Kesehatan	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan	WBBM
Layanan Kesehatan	UPTD Laboratorium Kesehatan	WBK
Layanan Pendidikan	SMK Negeri 1 Bandung	WBK
Layanan Pajak Daerah	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Sukarno Hatta	WBK

02

PENERAPAN SPIP/MITIGASI RESIKO

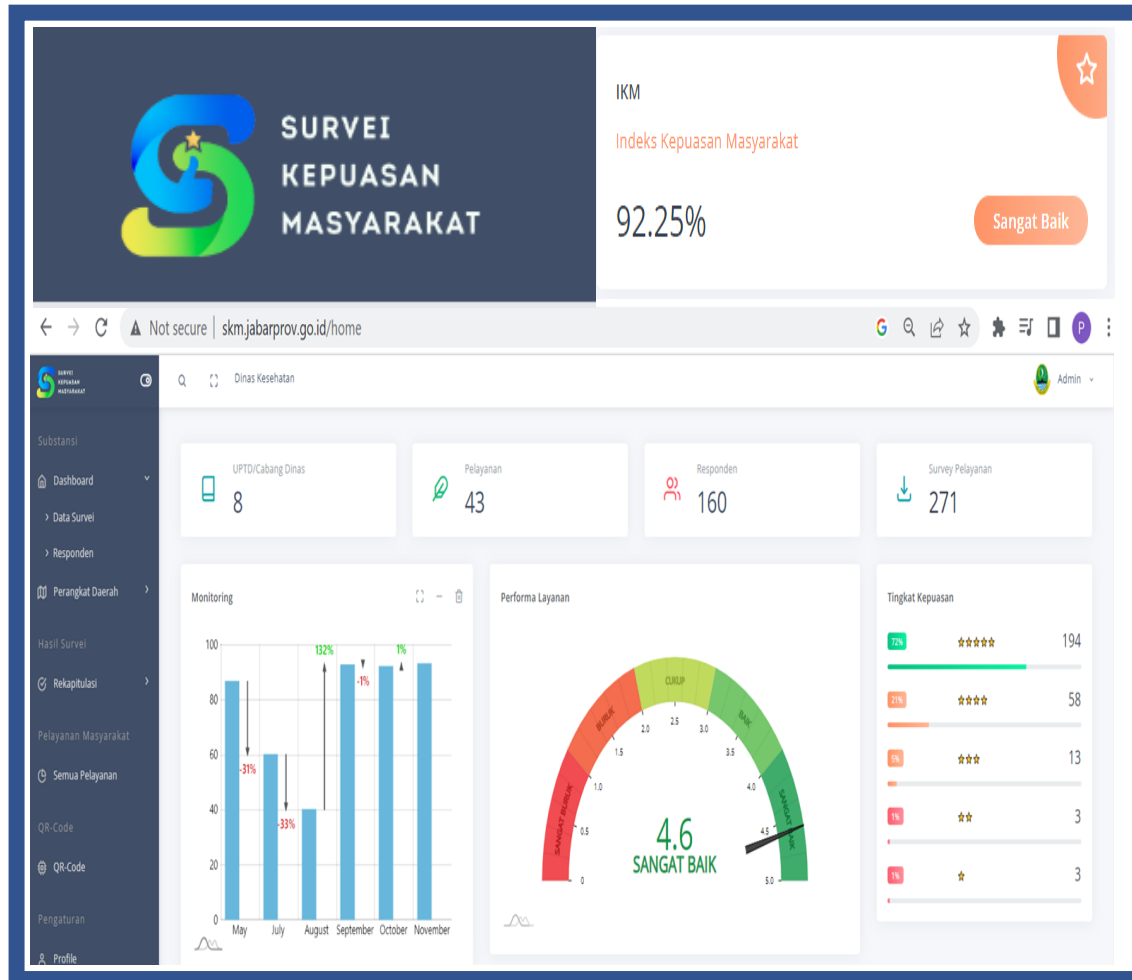


Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

KOMITMEN PELAYANAN PRIMA

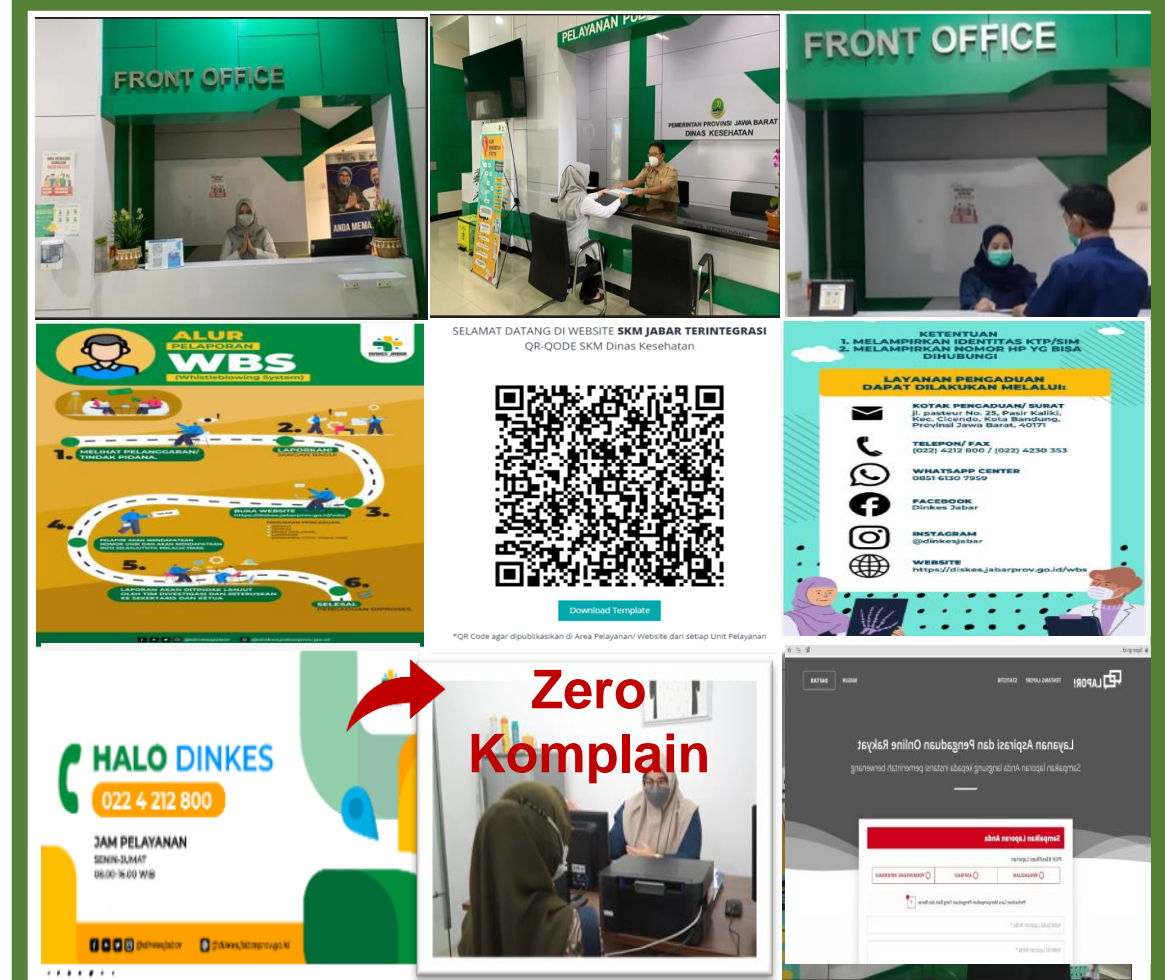
01

PENILAIAN KEPUASAN MASYARAKAT



02

COMPLAIN HANDLING



PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

BEFORE



Before
Administrasi internal & eksternal masih manual dan terpisah-pisah, media pelayanan terbatas .

01

Before
Ruang pelayanan kurang representative, padif menunggu tamu.

02

Before
Media Sosial dan website dimanfaatkan terbatas, hanya menginformasikan layanan lmbaga.

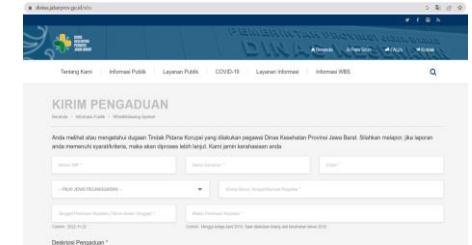
03

Before
Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) tidak terintegrasi dan dilakukan manual dengan google form .

04

Before And After

CONTINUES IMPROVMENT



After
Adm internal dan eksternal berbasis IT dan terpadu, media pelayanan tidak terbatas

01

After
Ruang pelayanan representative , aktif mendekatkan pelayanan .

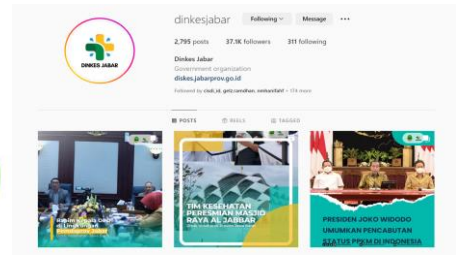
02

After
Media sosial dan website digunakan untuk layanan informasi, agenda pimpinan dan sumber informasi .

03

After
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terintegrasi dengan skm.jabarprov.go.id dengan hasil SKM "sangat baik"

04



PERBAIKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

HASIL E-MONEV 2021 “TIDAK INFORMATIF”

1. Biro Badan Usaha Milik Daerah & Investasi Sekretariat Jawa Barat	14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jabar	15. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	16. Inspektorat Provinsi Jawa Barat
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jabar	17. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
5. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat
6. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	21. Badan Kepegawalan Daerah Provinsi Jawa Barat
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	23. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	24. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat	25. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
13. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	26. Dinas Kesehatan

• 0%-19,9% mendapat predikat **Tidak Informatif**;

Dinas Kesehatan tidak mengembalikan form evaluasi E-Monev KI Jabar pada tahun 2021 sehingga termasuk pada perangkat daerah peridikat “TIDAK INFORMATIF”

HASIL E-MONEV 2022 “INFORMATIF”

No	Nama Perangkat Daerah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Dinas Pendidikan
4	Dinas Pendapatan Daerah
5	Dinas Kesehatan
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9	Dinas Sosial
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
13	Dinas Sumber Daya Air
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
15	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
16	Dinas Perkebunan
17	Satuan Polisi Pamong Praja

Perangkat
Daerah yang
“Informatif”

Dinas Kesehatan mengikuti E-Monev KI Jabar secara online melalui website <https://e-monevkijabar.com/> dengan meraih predikat Perangkat Daerah “INFORMATIF” ke-5



03

INOVASI YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP KINERJA ORGANISASI DAN MEMBERIKAN KEBERMANFAATAN BAGI MASYARAKAT



PENGHARGAAN

CAPAIAN PENGHARGAAN TAHUN 2022



49

Penghargaan

5

Internasional

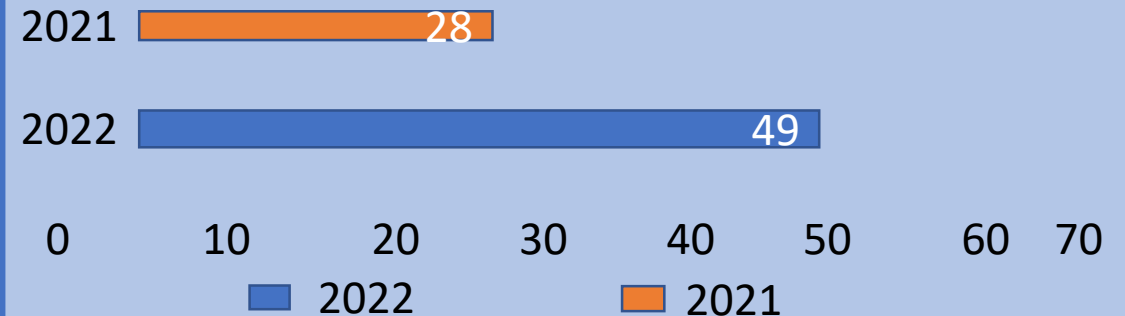
40

Pemerintah/Nasional

4

Non Pemerintah

PRESTASI (PENGHARGAAN) DINAS KESEHATAN TAHUN 2021-2022



6 BESAR IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI (RB) TINGKAT OPD SE-JAWA BARAT

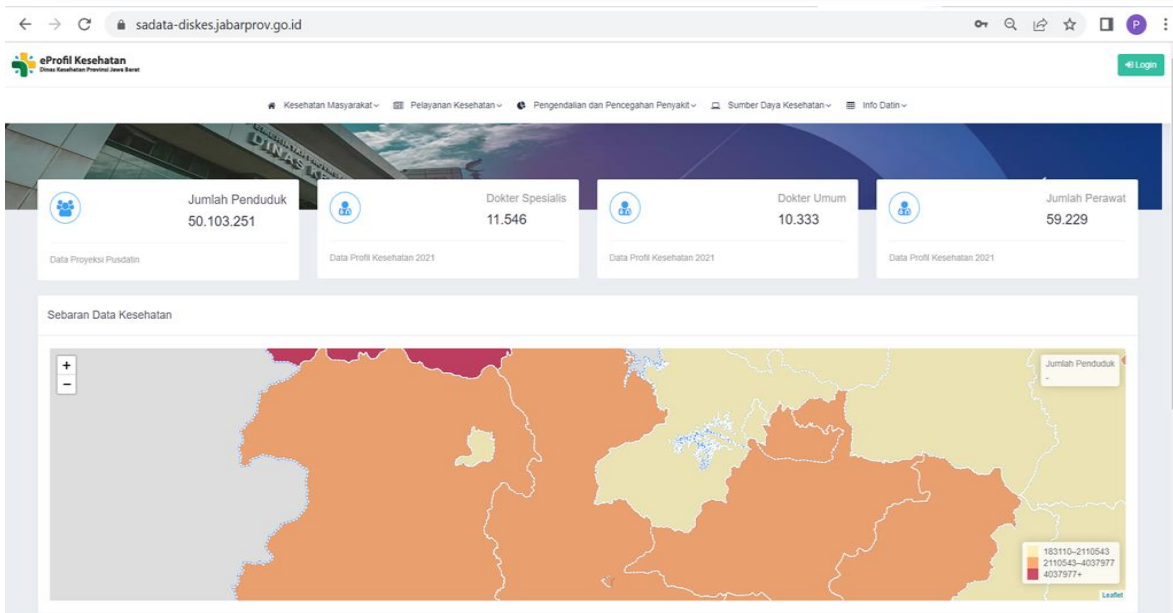


Tim Evaluasi **Pengukuran IRB PD** di Lingkungan Pemdaprov Jabar tahun 2022, Dinas Kesehatan Jawa Barat masuk **ke dalam 6 besar implementasi reformasi birokrasi (RB) tingkat OPD se-Jawa Barat**

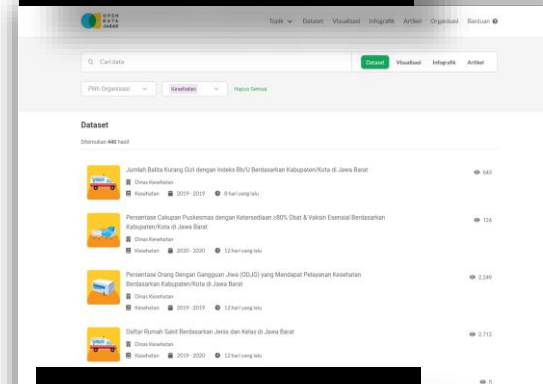
INOVASI YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP KINERJA ORGANISASI

• SADATA DINKES : <https://sadata-disk.es.jabarprov.go.id/>

❖ Dalam mendukung pengelolaan data dan informasi kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, maka dibangunlah aplikasi SADATA. Dengan aplikasi sadata maka kegiatan pengumpulan dan validasi data kesehatan dapat dilakukan secara cepat dan akurat



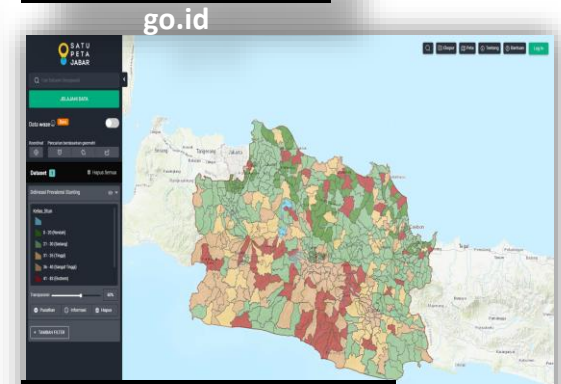
opendata.jabarprov.go.id



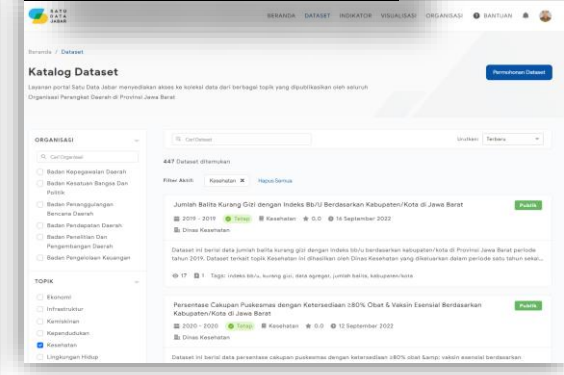
dashboard.jabarprov.go.id



satupeta.jabarprov.go.id



satudata.jabarprov.go.id



SIJANTAN JUARA

SiJantan merupakan Sistem Jaminan Kesehatan Juara untuk memberikan informasi, membantu Fasilitasi dan Koordinasi permasalahan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan warga Jawa Barat dan layanan program JKN



BEFORE

<https://sites.google.com/view/sijantan-juara>



AFTER

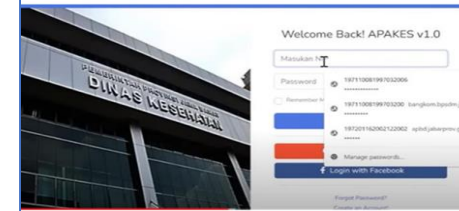
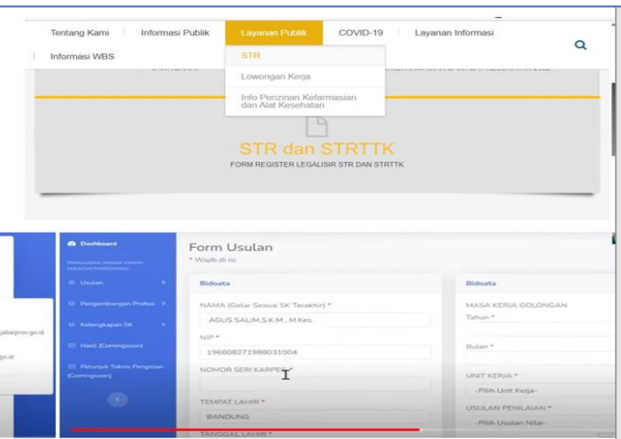
REGISTRASI STR DAN STRTTK PADA APLIKASI APAKES

BEFORE



AFTER

REGISTRASI STR DAN STRTTK PADA WEBSITE DINKES JABAR



INOVASI LUAR BIASA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN SERTA MAMPU BERKONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN KINERJA RS

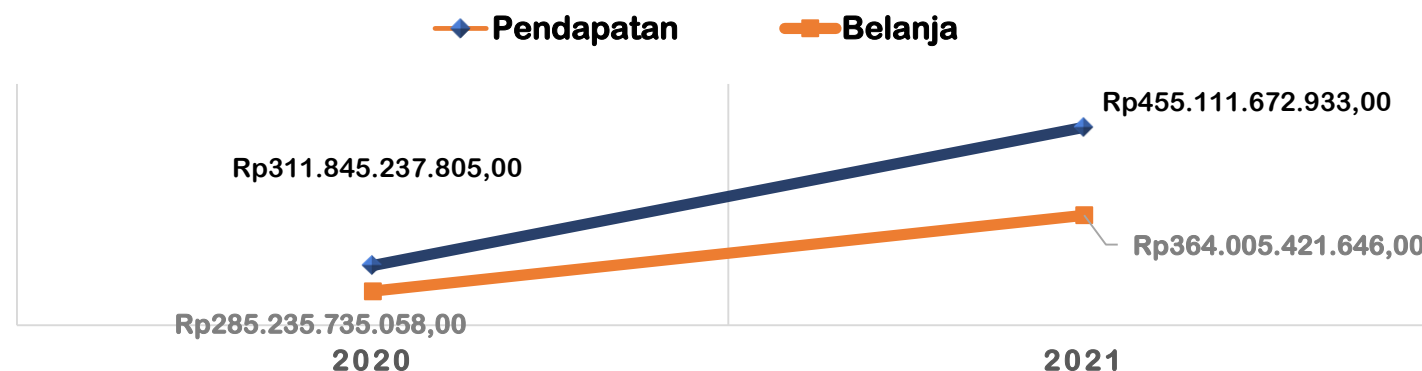


SusTera

(Sustainable Sejahtera)

SEBAGAI
INOVASI INDUK

- Rumah Sakit harus dapat menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan berkualitas, berdaya saing, tanpa hambatan finansial.
- **Konsep universal** dengan target **kemandirian pendanaan berkelanjutan**, dan kepuasan pelanggan dengan 6 Langkah.
- Tata Kelola Manajemen RS
- Replikasi oleh beberapa rumah sakit
- Buku panduan



INOVASI IKM

INOVASI YANG MEMBERIKAN KEBERMANFAATAN KEPADA MASYARAKAT

INNNOVATION GOVERNMENT AWARD 2022



**RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI JAWA BARAT**



KEBAHARUAN:

1. Sebagai inisiator dalam pelayanan Kesehatan jiwa kepada masyarakat secara online
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan secara digital
3. Memastikan pelayanan Kesehatan Jiwa disaat adanya pembatasan aktivitas



KEBERMANFAATAN:

1. Memudahkan akses layanan konsultasi Kesehatan mental secara online dengan tenaga kesehatan
2. Mengurangi hambatan bagi masyarakat dalam pencarian pertolongan terhadap masalah Kesehatan mentalnya
3. Menurunkan stigma terhadap masalah Kesehatan jiwa



KEWENANGAN :

1. Perda Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kesehatan Jiwa
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat terkait kebijakan pelayanan KJOL No.445.2/1181/RSJ tahun 2020



REPLIKASI

Pengembangan platform yang lebih mutakhir seperti chatbot, video call untuk pengembangan layanan selanjutnya serta kerjasama sosialisasi program dengan PIKOBAR Jabar

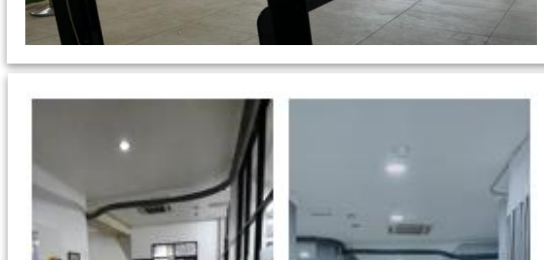
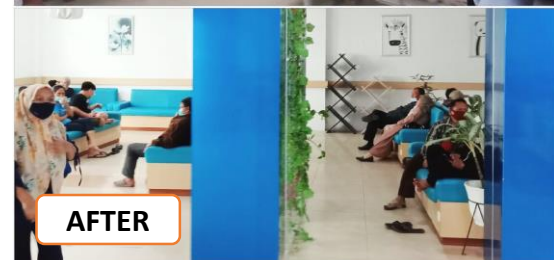
Meningkatkan Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hidup Sehat

BISIK

(Bincang Sehat Asyik Bersama PKRS RSUD Al Ihsan)



IMPLEMENTASI SUSTERA TERHADAP SARANA PELAYANAN (INFRASTRUKTUR / FASILITAS)

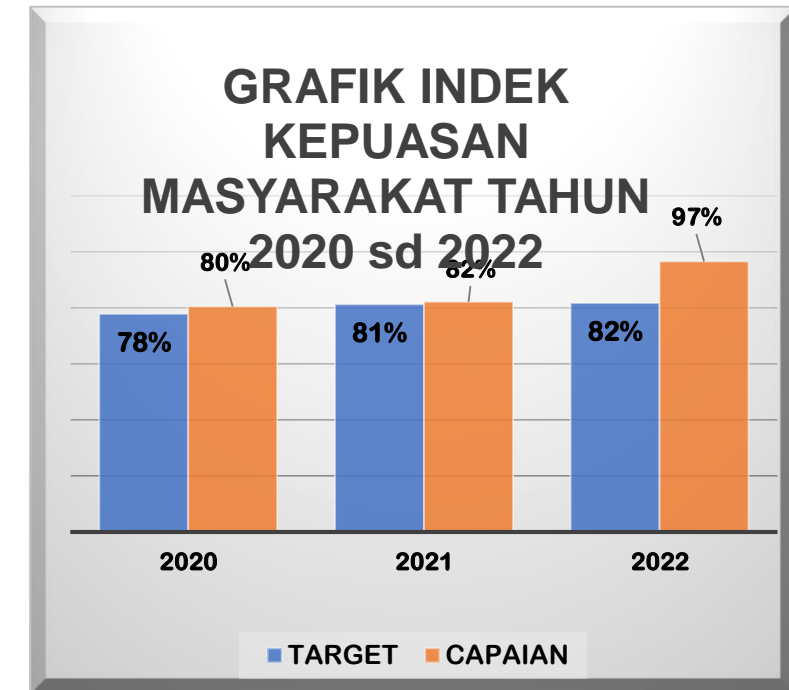
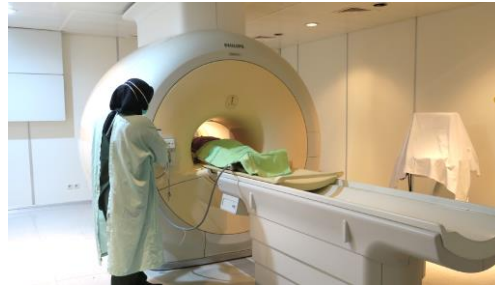




LAYANAN TERINTEGRASI YANG MENGHADIRKAN KEPUASAN & KEBERMANFAATAN BAGI MASYARAKAT

EMPAT PELAYANAN UNGGULAN : JANTUNG, KANKER, URONEFRO & STROKE

TIM MEDIS & PENUNJANG MEDIS TERINTEGRASI



Pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 TW II mencapai 97.01 % dengan peringkat "A"



04

DOKUMNETASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI



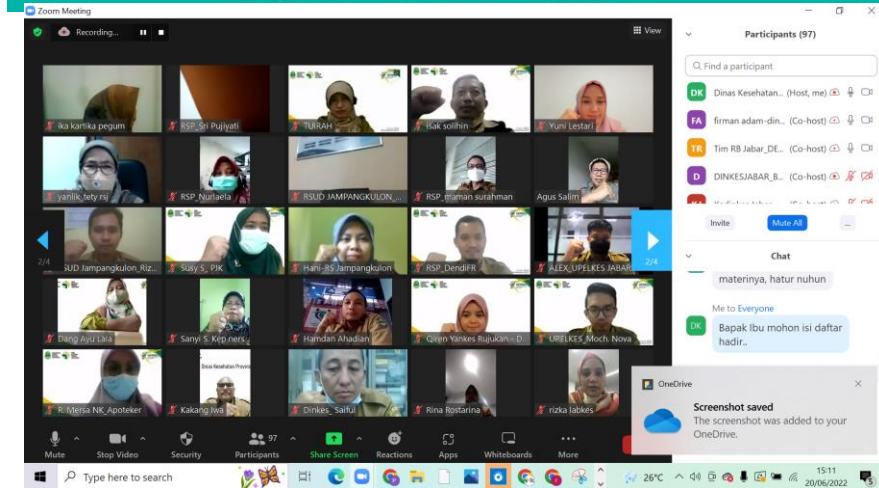
PENCANANGAN RB DAN ZI



RAPAT PEMBENTUKAN TIM KERJA RB



RAPAT KOORDINASI TIM RB



SURVEY INTERNAL



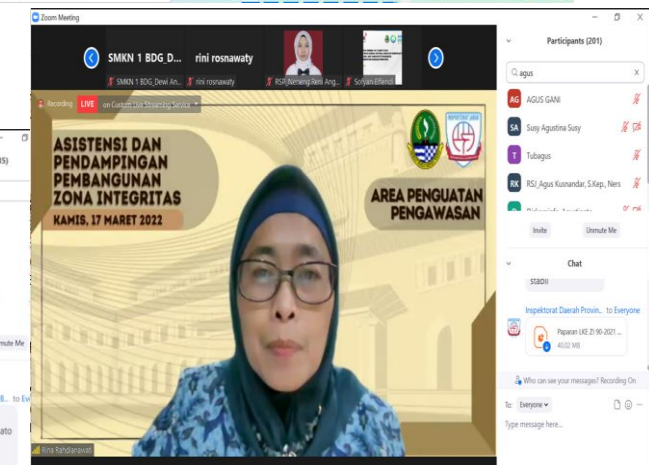
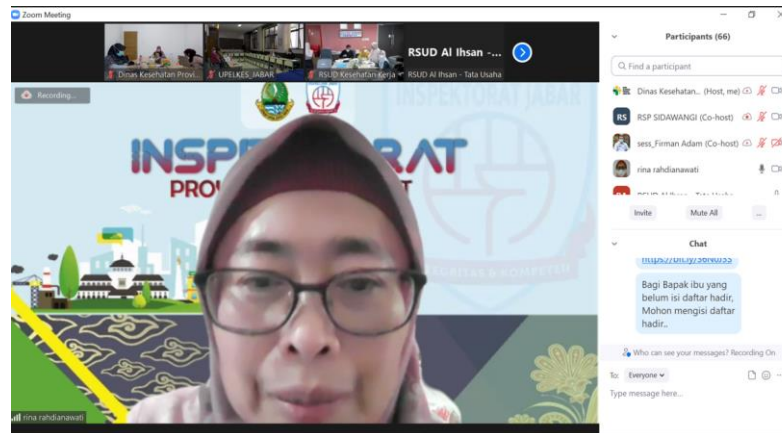
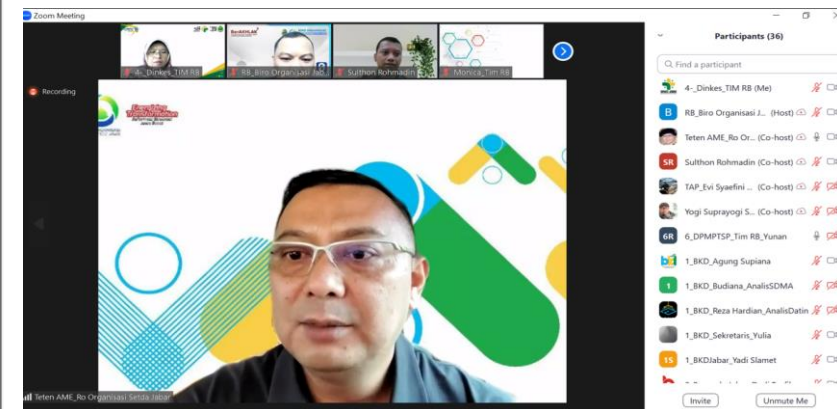
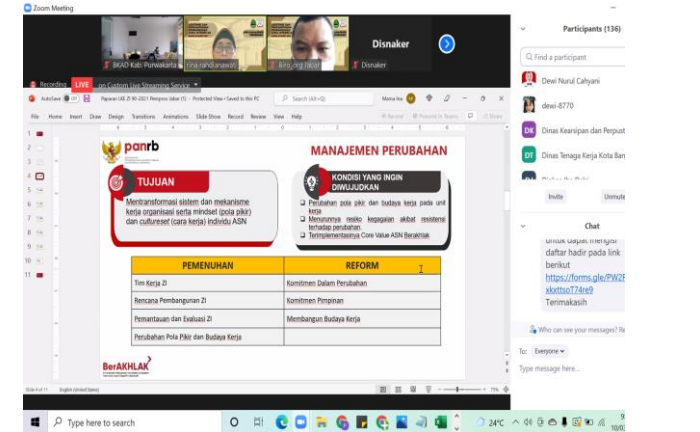
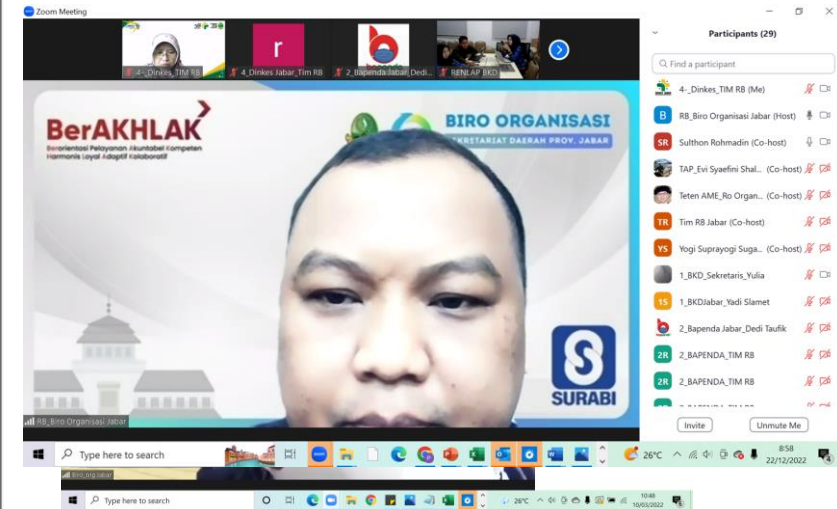
KOMITMEN ZONA INTEGRITAS MELALUI PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS



DOKUMENTASI KEGIATAN

PENDAMPINGAN BIRO ORGANISASI

PENDAMPINGAN INSPEKTORAT



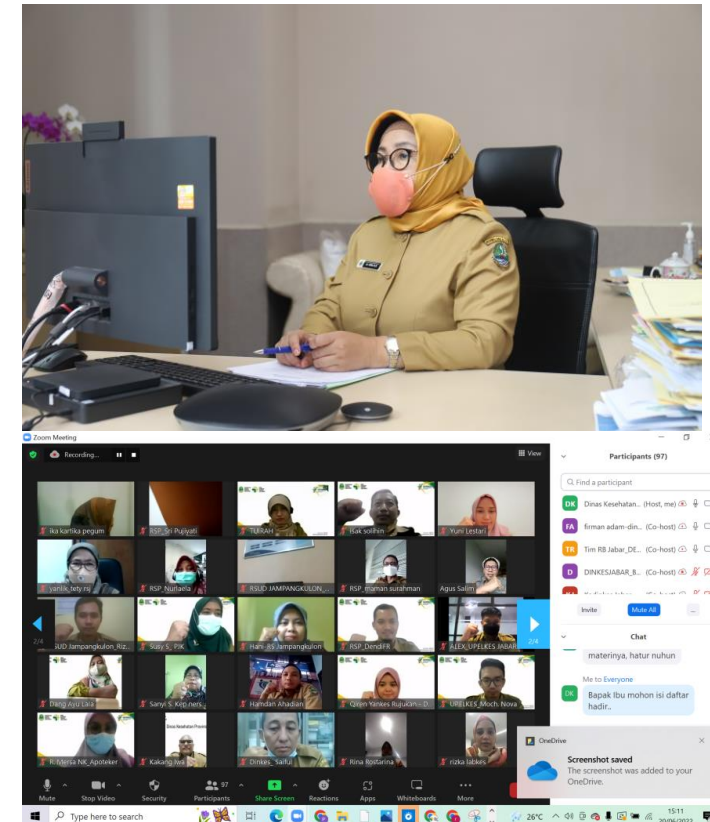
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

SOSIALISASI DAN INTENALISASI

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI



SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS



SOSIALISASI DAN INTENALISASI

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI BERAKHLAK

The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, there is a list of participants including 'Dinas Kesehatan Prov.', 'Bur, Biro Organisasi', and 'Abdul Goni'. The main window displays a chat window with a list of messages. The messages are organized into a table with columns for 'From', 'To', 'Subject', and 'Content'. The messages are related to the 'BerAKHLAK' program and its implementation in the health sector.

The image shows a man in a military uniform, identified as Dr. Firman Adam, S. Pd., M. M. Pd., speaking at a podium. He is wearing a white face mask. The background is a green wall with a logo. The text 'Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja Berakhlak' is overlaid on the image.

SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN SKM JABAR



The poster is titled 'SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PELAYANAN'. It lists five types of services: 1. Pelayanan Perizinan Fasyankes, 2. Pelayanan Perizinan Farmalkes, 3. Pelayanan Legalisir STRTK dan STR, 4. Pelayanan Permintaan Informasi Publik, and 5. Klik link dibawah ini. The link provided is https://bit.ly/SKM_Dinkes_Jabar. The poster also features a rating scale from 1 (sad face) to 5 (happy face).



PENILAIAN EKTERNAL BIRO ORGANISASI

← → ↻ rbjabarprov.go.id/home

SIJRABI Dinas Kesehatan

DINKES @ Online

Menu: Dashboard, INFO, PMPB, RB Perangkat Daerah, Ager Pembinaan, SETTING, Profile

PENILAIAN		Bobot	Self Assessment		Hasil Verifikasi	
			Nilai	%	Nilai	%
I	PEMENGUATAN	14.00	14.40	89 %	10.58	72 %
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2.00	1.83	92 %	1.77	88 %
2	DEREGLASASI KEBUUKAN	1.00	1.00	100 %	0.50	50 %
3	PENATAAN DAYA PENGUATAN ORGANISASI	2.00	2.00	100 %	1.80	90 %
4	PENATAAN SAKALAKSANA	1.00	1.00	100 %	0.85	85 %
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SOM	1.40	1.40	100 %	1.13	81 %
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50	2.50	100 %	1.72	69 %
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2.20	2.17	98 %	1.42	65 %
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.50	2.50	100 %	1.39	56 %
II	REFORMASI	11.70	15.84	92 %	12.17	56 %
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3.00	2.25	75 %	1.54	51 %
2	DEREGLASASI KEBUUKAN	2.00	2.00	100 %	0.50	25 %
3	PENATAAN DAYA PENGUATAN ORGANISASI	1.50	1.50	100 %	1.50	100 %
4	PENATAAN SAKALAKSANA	3.75	3.75	100 %	2.77	74 %
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SOM	2.00	1.50	75 %	1.50	75 %
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3.75	3.75	100 %	0.00	0 %
7	PENGUATAN PENGAWASAN	1.95	1.95	100 %	1.95	100 %
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3.75	3.24	86 %	2.41	64 %

KOMPONEN HASIL

INDIKATOR	SKOR	REKAM
AKUNTABILITAS KEMER	0.00	0.00
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	0.00	0.12
PENINGKATAN KUALITAS BERKAS DAN BERKAS KEMER	0.00	0.00
KEMER ORGANISASI	0.00	0.00
PENINGKATAN KUALITAS BERKAS DAN BERKAS KEMER	0.00	0.00

Nilai Self Assessment: 89.58

Indeks RB Perangkat Daerah: A

Nilai Hasil Verifikasi: 61.41

Indeks RB Perangkat Daerah: B



EVALUASI RBZI DI UPTD







***Energizing
Transformasi***
Reformasi Birokrasi
Jawa Barat